



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 59 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2010  
TENTANG  
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa santunan kematian merupakan pemberian bantuan dari Pemerintah Kota Probolinggo yang diperuntukkan bagi Penduduk Kota Probolinggo.
- b. bahwa persyaratan untuk memperoleh santunan kematian sebagaimana dalam Pasal 3 huruf g dalam pelaksanaannya tidak sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo (lembaran Daerah kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 43), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf g dihapus, dan diantar huruf h dan huruf I ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf h1 sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### BAB III

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan

##### Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh Santunan Kematian adalah sebagai berikut :

- a. KTP/ KK Kota asli serta foto copy sebanyak 2 (dua) lembar almarhum/ almarhumah masih berlaku;
- b. Apabila KTP/ KK hilang, harus dilengkapi bukti laporan kehilangan dari Pihak Kepolisian tempat kehilangan;
- c. Bagi anak yang meninggal dunia di usia bayi yang belum masuk dalam KK, harus dilengkapi dengan surat kelahiran dari Bidan, Dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit (orang yang membantu proses kelahiran) mengetahui Lurah atau akte kelahiran (bila ada), serta foto copy sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Surat Keterangan Kematian dari kelurahan setempat;
- e. Foto copy KTP ahli waris sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. Surat permohonan dari ahli waris;
- g. **Dihapus;**
- h. Apabila almarhum/ almarhumah tidak mempunyai ahli waris, maka yang dapat menguruskan santunan kematian adalah Pengurus RT atau Pengurus RW atau Ketua Rukun Kematian setempat yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dengan membawa stempel dan dilampiri surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menerangkan rencana penggunaan uang Santunan Kematian yang akan diterima;
- h1. Apabila keluarga dan/ atau ahli waris dari almarhum/ almarhumah keberatan menguruskan santunan kematian, dapat menyerahkan pengurusan santunan kematian kepada Ketua RT, Ketua RW dan/ atau Ketua Rukun Kematian dengan melampirkan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari keluarga dan/ atau ahli waris dari almarhum/ almarhumah; dan
- i. Pengajuan permohonan dan berkas Santunan Kematian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kematian.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 28 Oktober 2015

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**Hj. RUKMINI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 28 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**H. JOHNY HARYANTO**

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**



**WAHONO ARIFIN, SH MM**

NIP. 19650912 199303 1 008